

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan berakhirnya era perang dingin, tatanan politik dunia internasional memunculkan pendekatan-pendekatan institusional terhadap isu perdamaian, keamanan, dan semakin berkembangnya *Free Trade Agreement* (FTA), serta terus bergulirnya proses globalisasi dewasa ini, telah merubah proses hubungan antar negara di suatu kawasan. Di era globalisasi dewasa ini perekonomian global telah mengakibatkan adanya penyatuan ekonomi antar negara di dunia, untuk itu ekonomi menggiring setiap negara untuk terjun langsung ke dalam arena globalisasi.¹ Pada hubungan internasional dalam proses perkembangannya salah satu bagian besar yang mengalami perkembangan yang cukup signifikan adalah kerjasama dalam ekonomi. Hal tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi dan meningkatkan pertumbuhan serta kebutuhan ekonomi dan perdagangan di kawasan yang terintegrasi dengan sistem ekonomi global, yang dalam hal ini dapat dilakukan dengan suatu hubungan

¹ Joseph E Stiglitz, "Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil", Bandung: Mizan. 2007, hlm 52 dalam Kerangka Acuan (TOR), "*East Asian Regional Architecture: New Economic and Security Arrangements and U.S. Policy*"; Congressional Research Service (CRS) Report for Congress; 04 January 2008. Bagian dari Kajian BPPK Kementerian Luar Negeri RI.

kerjasama antar negara di bidang ekonomi dengan didirikannya EPA (*Economic Partnership Agreement*).²

Pada perjanjian EPA dan FTA (*Free Trade Agreement*) selalu berlangsung di antara negara maju dengan negara berkembang yang dalam situasi ekonominya tidak seimbang, di mana dalam hal ini terjadi pada negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang maupun negara setara yang saling ketergantungan satu sama lain. Sebagai contohnya dalam dokumen pengajuan EPA antara Uni Eropa dengan negara-negara Afrika dan Karibia, begitu pula FTA antara Thailand dengan Amerika Serikat (AS), Korsel dengan AS, termasuk usulan FTA antara Uni Eropa dengan ASEAN. Ketidaksetaraan ini menunjukkan bahwa perdagangan bebas, baik dalam kerangka EPA, FTA, dan WTO (*World Trade Organization*), adalah bagian dari proyek dominasi ekonomi.³ Dengan gambaran seperti itu menuntut suatu sikap dan tanggapan yang sesuai dari setiap negara anggota masyarakat internasional, tetapi

² Pada perjanjian perdagangan dunia, munculnya kesepakatan *Economic Partnership Agreement (EPA)* sebenarnya dikarenakan tertunda-tundanya target penyelesaian perjanjian perdagangan bebas multilateral dalam WTO, sehingga kesepakatan yang awalnya masih dalam proses penyelesaiannya sampai pada akhirnya gagal dalam mencapai kesepakatan. Maka hal ini membuat negara-negara maju dengan desakan beberapa perusahaan transnasional, menjadikan EPA dan FTA jalan keluar dari kebuntuan negosiasi WTO. EPA merupakan kerja sama bilateral yang lebih luas dari Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement/FTA*). Perjanjian ini bukan sekadar mencakup liberalisasi perdagangan, tetapi juga kerja sama di bidang investasi, sektor jasa, dan ketenagakerjaan.

³ KKPM, "Perjanjian EPA: Makin Merdeka atau Terjajah?", diakses dari: <http://www.kkpm.blogspot.com/2007/10/perjanjian-epa-makin-merdeka-atau.html/>. Pada tanggal 18 Februari 2012, pukul 14:05 WIB

dalam hal ini tidak sepenuhnya dapat mengandalkan pada keunggulan-keunggulan komparatif yang selama ini dimiliki oleh suatu negara.⁴

EPA (*Economic Partnership Agreement*), merupakan kerjasama bilateral dalam ekonomi yang mulai didirikan Jepang sejak 9 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2003, EPA sebetulnya adalah konsep kerjasama ekonomi global yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk dapat bersaing dan dapat mengimbangi kekuatan ekonomi negara lain untuk bisa jauh lebih unggul. Jepang saat ini sudah melakukan kesepakatan EPA dengan delapan negara yakni, Mexico, Chili dan enam negara ASEAN (*Association of South East Asian Nation*), seperti Singapura dan Thailand yang lebih dulu menandatangani EPA pada tahun 2002, Thailand pada tahun 2003, Malaysia pada tahun 2005, Filipina pada tahun 2006, Brunai Darussalam pada tahun 2006, dan Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2007.⁵ Strategi dalam melakukan kerjasama dengan beberapa negara di kawasan Asia, bagi Jepang terdapat potensi yang besar untuk kedepannya dalam peningkatan perekonomian dan dominasinya di kawasan Asia, untuk itu kebijakannya terfokus di kawasan Asia. Sehingga Jepang memiliki motto dalam EPA *Mutual Prosperity with Asia* atau kesepakatan saling menguntungkan dengan Asia.

⁴ Keunggulan-keunggulan komparatif yang dimaksud adalah jumlah penduduk yang besar, sumber daya alam yang melimpah dan lain-lain yang dimiliki oleh suatu negara. Dalam menghadapi suatu tantangan yang baru tersebut, keunggulan yang diandalkan akan lebih menentukan berhasil tidaknya suatu bangsa mencapai kemajuan pada kisaran mampu menguasai IPTEK (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Komunikasi) serta etos kerja, disiplin nasional dan memiliki daya saing yang tinggi.

⁵ Widiana Puspitasari, "Peranan Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Jepang (IJEPA) dalam Eksplorasi Sumber Daya Alam di Indonesia: (Studi Kasus: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla di Sumatra Utara)". Skripsi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia, 2008, Bandung, hlm 2.

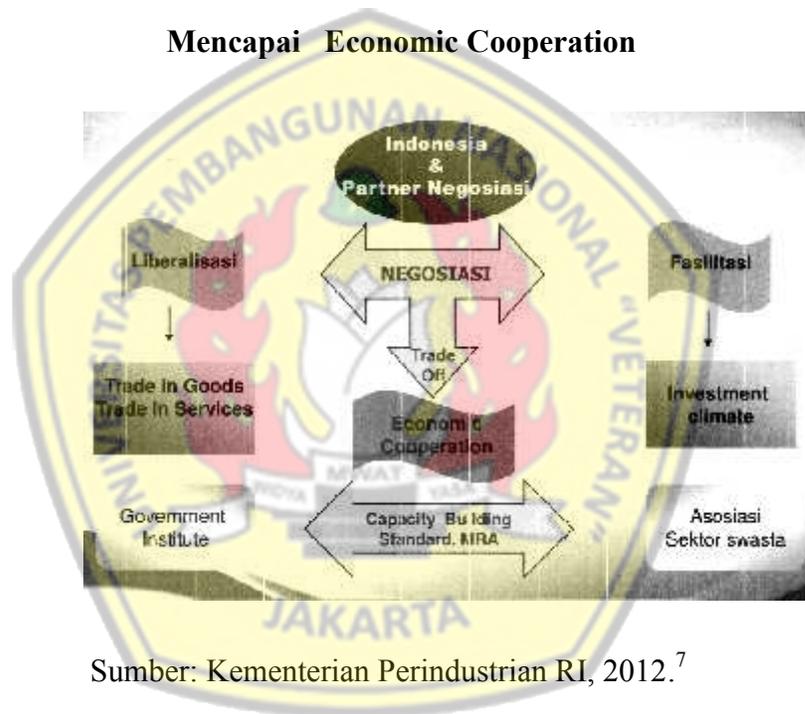
Untuk negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu negara yang diperhitungkan dalam dunia perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Dapat dilihat dari kekayaan sumber daya alamnya yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara eksportir produk migas yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini Indonesia juga merupakan negara importir yang mempunyai potensi untuk menjadi akses pasar yang besar sesuai dengan jumlah penduduknya yang lebih dari 200 juta jiwa di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan untuk Jepang merupakan negara industri terbesar di kawasan Asia Timur. Dengan kemajuan teknologi Jepang yang begitu pesat membuat Jepang mempunyai kemampuan dalam teknologi dan dapat memproduksi barang yang dapat diekspor sampai ke seluruh dunia. Tetapi dilihat dari kemampuannya terdapat sisi kekurangan bagi Jepang dalam hal sumber daya alamnya yang terbatas, sehingga mengakibatkan Jepang menjadi salah satu negara importir yang begitu aktif untuk membeli produk-produk mentah untuk dapat diolah menjadi produk jadi.

Untuk itu dengan adanya celah tersebut, yang kemudian dimanfaatkan oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang yang membutuhkan negara maju seperti Jepang untuk dapat meningkatkan perekonomiannya, maka Indonesia melakukan hubungan dagang dengan Jepang. Dengan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Jepang, dalam hal ini bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor dengan Indonesia. Menurut statistik Pemerintah RI Ekspor Indonesia ke Jepang

bernilai 23.6 milyar dollar AS, sedangkan pada tahun 2007 impor Indonesia dari Jepang adalah 6.5 milyar dollar AS sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia.⁶

Gambar 1.1

Skema Proses Kerjasama Indonesia dengan Suatu Negara dalam Mencapai Economic Cooperation



Sumber: Kementerian Perindustrian RI, 2012.⁷

Bagi Indonesia, Jepang tidak hanya sebagai mitra dagang terbesar tetapi merupakan negara pemberi ODA (bantuan pembangunan tingkat pemerintah) yang terbesar bagi Jepang, yang mulai dilakukan dari tahun 1954, dalam bentuk

⁶ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia 在インドネシア日本国大使館, diakses dari: <http://www.id.emb-japan.go.jp>. Pada tanggal 13 Februari 2012, pukul 20:30 WIB

⁷ Kementerian Perindustrian, "Bahan Presentasi Kementerian Perindustrian KUKM", diakses dari: <http://www.kemenperin.go.id>. Pada tanggal 21 Juni 2012, pukul 10:15 WIB

penerimaan *trainee* untuk mendapatkan pelatihan di bidang industri, komunikasi transportasi, pertanian dan kesehatan. Berikut adalah tabel dari nilai realisasi Bantuan ODA Jepang di Indonesia.

Tabel 1.1
Nilai Realisasi Bantuan ODA Jepang di Indonesia.

Tahun	Pinjaman Yen	Bantuan Hibah	Kerjasama Teknik	Total	Referensi	
					APBN Indonesia	GDP Indonesia
2000	945,66	52,07	144,60	1.142,33	23.395,29	165.020,93
2001	702,83	45,16	117,27	865,26	30.772,74	164.145,45
2002	441,59	63,54	126,46	631,59	36.945,76	200.110,83
2003	946,77	82,36	120,66	1.149,79	43.206,99	237.416,25
2004	452,52	25,47	105,96	583,95	41.879,10	256.837,29
2005	1.072,18	172,21	98,40	1.342,79	40.987,08	286.969,05
2006	882,83	60,67	91,11	1.034,61	70.711,36	364.459,37
Total	24.690,06	1.939,16	2.907,49	29.597,35	-	-

Sumber: OECD/DAC, *Japan's Official Development Assistance (ODA) White Paper 2007* (Departemen Luar Negeri Jepang), IMF, Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS).

Berdasarkan realisasi netto pembayaran pada tahun 2005 adalah 1,22 milyar dollar AS, yaitu $\pm 17\%$ dari seluruh ODA yang diberikan Jepang.⁸ Selain itu, realisasi bantuan ODA Jepang untuk tahun 2006 secara kumulatif kepada Indonesia berjumlah 29,5 milyar dollar AS, dalam hal ini total kumulatif sampai tahun 2006. Oleh karena

⁸ Kedutaan Besar Jepang di Indonesia 在インドネシア日本国大使館, *Op.cit* hlm. 2.

itu, bagi Indonesia, Jepang adalah negara pedonor terbesar. Demikian juga bagi Jepang, Indonesia adalah negara penerima bantuan terbesar. Dengan latar belakang inilah, Jepang dan Indonesia telah memupuk persahabatan selama setengah abad, dengan begitu kedua negara ini telah menjadi mitra penting.

Untuk dapat menjalin kerjasama ekonomi yang lebih erat lagi maka pada 8 September 2003 kedua negara ini melakukan pertemuan untuk mendiskusikan tentang pembentukan EPA antara Indonesia dan Jepang, yang dilakukan di Jepang untuk melakukan pembahasan mengenai *Free Trade Agreement*(FTA). Dalam kesepakatan EPA yang telah dibentuk ini adalah suatu kebijakan yang mencerminkan kepentingan yang berbeda antara Indonesia-Jepang. Untuk itu dilihat dari sisi Jepang, EPA merupakan adopsi dari proteksionisme yang berasal dari pilihan-pilihan ekspansi serta dapat memberi perlindungan bagi sektor swasta Jepang. Sedangkan dilihat dari sisi Indonesia, EPA dalam hal ini mampu menggeser perekonomian berbasis sumberdaya menjadi industri manufaktur. Karena bagi Indonesia, dalam pandangannya kemiskinan bersumber dari konsentrasi yang berlebih atas pembangunan dengan basis agrikultur dan standar hidup yang sangat tinggi, sehingga ini hanya akan dapat dicapai melalui industrialisasi dan liberalisasi. Dalam hal ini bagi Indonesia melalui pembentukan EPA ini mempunyai upaya untuk meningkatkan investasi dan perdagangan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk itu adapun

beberapa alasan yang mendasari Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan Jepang melalui EPA, yaitu:⁹

1. Jepang merupakan mitra dagang dan investor utama buat Indonesia, dan Indonesia adalah penerima terbesar ODA Jepang.
2. Akses pasar untuk produk Indonesia ke pasar ekspor terbesar mewakili 20% dari ekspor yang ada, sedangkan Jepang merupakan sumber impor terbesar kedua bagi Indonesia.
3. Peluang untuk mengirim tenaga kerja semi terampil.
4. EPA memberikan kepastian akses pasar yang lebih preferensial dan luas dibandingkan dengan program seperti *Generalized System of Preferences* (GSP), dan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara lain yang telah memiliki perjanjian dengan Jepang, seperti Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.

Dengan kesepakatan yang telah dilakukan melalui EPA, maka secara resmi kesepakatan tersebut tertuang dalam *Indonesia-Japan Economy Partnership Agreement* (IJEPA), yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 20 Agustus 2007 di Jakarta. Dalam hal ini IJEPA merupakan suatu kesepakatan perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA) yang bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan

⁹ Indonesia Embassy-Tokyo, "Manfaat Perdagangan EPA", diakses dari: http://www.Indonesiaembassy.jp/perdagangan/manfaat_epa.pdf/. Pada tanggal 22 Januari 2012, pukul 13:02 WIB

dan ekspor antara Indonesia dan Jepang. Dengan terjalinnya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang maka IJEPA *Framework Agreement* dalam hal ini adalah rangkaian persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi, sehingga perjanjian kerjasama ini telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008.¹⁰ Dengan adanya persetujuan kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Jepang dalam hal kemitraan ekonomi, sehingga dalam hal ini kedua negara telah menetapkan suatu skema penetapan tarif atau yang disebut *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS)¹¹.

Kerjasama pemerintah Indonesia dan Jepang dalam bidang perekonomian yang tertuang pada *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dalam hal *capacity building* yang menekankan pada peningkatan pembangunan kapasitas industri di Indonesia. Kesepakatan tersebut dilakukan agar siap menghadapi kemitraan ekonomi Indonesia-Jepang. Karena untuk dapat meningkatkan daya saing Indonesia di sektor industri, maka dalam kerangka EPA wujud kerjasama dalam IJEPA adalah pembentukan *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC).

¹⁰ Gastia, "Country Origin IJEPA -Surat Keterangan Asal AFTA Jepang dan Pengisiannya", diakses dari: <http://www.gastia.com/forum/country-origin-ijepa-surat-keterangan-asal-afta-jepang-dan-pengisiannya/>. Pada tanggal 11 Desember 2011, pukul 11:10 WIB

¹¹ Skema penetapan tarif atau yang disebut USDFS (*User Specific Duty Free Scheme*) adalah suatu skema penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada user dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi. Pihak pengguna fasilitas (user) merupakan suatu badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang akan mendapat fasilitas USDFS. Barang-barang yang mendapat fasilitas USDFS ditetapkan bea masuknya sebesar 0%. Untuk mendapatkan fasilitas dimaksud user terlebih dahulu harus memperoleh Surat Keterangan Verifikasi Industri – USDFS (formulir SK VI – USDFS) yang diterbitkan oleh Surveyor yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

Dalam hal ini MIDEDEC secara resmi disepakati oleh kedua negara yang mulai di implementasikan pada tanggal 1 Juli 2008. Pada tahun 2007 yang lalu, sudah dilakukan studi mengenai “Pendalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global dengan Fokus Daya Saing Industri Kendaraan Bermotor, Elektronika Alat Berat dan Peralatan Listrik” dan selanjutnya pada tahun anggaran 2008 ini, dilakukan lagi pendalaman dengan fokus “Pembangunan Kapasitas Industri Manufaktur melalui MIDEDEC-IJEPA”.¹²

Dengan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia-Jepang dalam bidang perekonomian melalui IJEPA yaitu kerjasama ekonomi yang dilandasi oleh tiga pilar: Liberalisasi Pasar, Fasilitasi dan Kerjasama dalam rangka pembangunan kapasitas industri yang merupakan salah satu kegiatan utama yang diprioritaskan Indonesia, khususnya oleh Kementerian Perindustrian adalah *Implementasi Manufacturing Industry Development Center (MIDEDEC)*, pada 13 sektor industri. Tiga belas subsektor yang tercakup dalam MIDEDEC antara lain sektor otomotif dan komponennya, elektronik dan perlengkapan elektrik, produk baja, tekstil, petrokimia dan oleo kimia, industri logam nonbaja, makanan dan minuman, konservasi energi, UKM, *welding, tooling*, promosi ekspor dan investasi, percetakan alat mesin, serta pengerjaan logam.

Melalui kesepakatan bersama dalam kerjasama antara kedua negara, maka pihak Jepang sepakat untuk memberikan bantuan untuk meningkatkan pembangunan

¹² Kementerian Perindustrian “Struktur Publikasi IJEPA”, diakses dari: <http://www.kemenperin.go.id/IND/Publikasi/Ijepa/struktur.pdf/>. Pada tanggal 14 Desember 2011, pukul 15:24 WIB.

kapasitas industri di Indonesia. Karena hal ini berkaitan dengan memajukan sektor-sektor penggerak, antara lain: sektor otomotif, elektrikal dan elektronik, alat berat dan mesin konstruksi, serta energi yang merupakan kepentingan bersama untuk kedua negara. Dalam hal ini Indonesia telah mempercepat pemberian fasilitas pembebasan tarif untuk bahan baku (USDFS) kepada Jepang, sedangkan pihak Jepang membantu untuk peningkatan dalam pembangunan kapasitas industri manufaktur di Indonesia melalui *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC). Dengan demikian untuk dapat meningkatkan pembangunan kapasitas industri manufaktur, maka pihak Jepang akan bekerjasama dalam tiga bidang kegiatan pokok, antara lain: Studi Dasar (*Basic Study*), Teknologi (*Technical Assistance Dispatching Expert*), Pelatihan (*For Trainee and Trainer*), Kegiatan Seminar/*Workshop*, Kegiatan Perjalanan/Kunjungan Pabrik. Untuk itu dengan hasil kesepakatan EPA diharapkan akan meningkatkan total ekspor Indonesia ke Jepang sekitar 4,68% dari total ekspor sebelumnya dan meningkatkan kesempatan bisnis sebesar 65 miliar dollar AS pada tahun 2010.¹³

1.2 Rumusan Permasalahan

Kerjasama kemitraan ekonomi yang berdasarkan atas perjanjian kerjasama bilateral dalam kerangka EPA melalui IJEPA melibatkan kedua negara dengan kekuatan dan kondisi ekonomi yang tidak seimbang, yaitu antara negara berkembang dan negara maju. Maka untuk sementara waktu hanya dapat memberikan manfaat

¹³ Syamsul Hadi, "Kerjasama Indonesia-Jepang", dalam *Kompas* pada tanggal 20 Agustus 2007.

yang asimetris bagi kedua negara. Dengan kondisi tersebut dapat mengancam keberlanjutan kerjasama pada kedua negara ini untuk jangka panjang. Tetapi dapat pula saling melengkapi satu sama lain dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disepakati bersama, sehingga memperoleh manfaat yang seimbang untuk kedua negara tersebut. Sejak awal, kerjasama Indonesia dan Jepang dalam IJEPA sepertinya tidak seimbang. Pada awalnya Indonesia meminta kompensasi dalam bentuk pembangunan kapasitas bagi industri di Indonesia. Jepang menyetujui permintaan Indonesia untuk membantu pembangunan pusat pengembangan industri manufaktur (*Manufactur Industry Development Center/MIDEC*) yang mencakup 13 sektor, sedangkan timbal balik untuk Jepang sendiri adalah mendapatkan kemudahan dari Indonesia dalam pasokan energi dan bahan baku yang berasal dari Indonesia. MIDEC diharapkan mendorong kemampuan industri untuk dapat menghadapi semakin terbukanya pasar di dalam negeri sekaligus memasuki pasar global.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian yang perlu penulis kaji lebih lanjut yaitu, *Bagaimana bentuk-bentuk implementasi Manucfuturing Industry Development Center (MIDEC) dalam kerangka IJEPa pada periode 2008-2011?*

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran IJEPA dalam pembangunan kapasitas industri manufaktur melalui MIDEK di Indonesia. Dengan demikian tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dinamika hubungan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang yang terjalin dalam IJEPA.
2. Untuk memperoleh gambaran bagaimana lingkup kerjasama IJEPA dalam pencapaian dari bentuk-bentuk implementasi MIDEK.
3. Untuk dapat mengetahui hambatan dan peluang yang diperoleh oleh Indonesia dan Jepang melalui kesepakatan IJEPA dalam kerangka implementasi MIDEK untuk pembangunan kapasitas industri manufaktur di Indonesia yang telah disepakati kedua negara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini ialah :

1. Secara akademis manfaat yang didapatkan dalam penelitaian ini adalah untuk memberikan informasi dan data mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka implementasi IJEPA melalui MIDEK yang di bahas

dalam penelitian ini yang berkaitan dengan jurusan Hubungan Internasional.

2. Mampu memberikan pengetahuan dan manfaat untuk data-data bagi para pembaca atau peneliti yang menaruh minat dalam memahami permasalahan yang dibahas, khususnya di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Selain itu skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang dalam kerangka implementasi IJEPA melalui MIDEK.

I.5 Kerangka Pemikiran

I.5.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang dengan kesepakatan kerjasama ekonomi dalam implementasi IJEPA dalam pembangunan kapasitas industri manufaktur melalui MIDEK, untuk dapat memperkuat dan membedakan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti mengenai permasalahan tersebut. Sebenarnya pada 14 Januari 2002 Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi mengeluarkan pernyataan “*Japan and the ASEAN in East Asia – A Sincere and Open Partnership*”, sehingga pernyataan ini di kenal sebagai “*Koizumi Doctrine*” yang

menekankan ideal tentang aksi bersama dan maju bersama sebagai *candid partners* dalam menekankan poin-poin kerjasama. Inisiatif Jepang untuk membentuk EPA dengan Indonesia terkait dengan pembentukan EPA dengan ASEAN, hal ini di tegaskan oleh Perdana Menteri Jepang Koizumi pada saat KTT ASEAN - Jepang di Phnom-Penh pada tanggal 5 November 2002.¹⁴ Dengan melihat pasar domestik dan regional yang besar membuat Indonesia menarik untuk dapat dijadikan sebagai basis produksi industri bagi Jepang. Untuk itu Jepang berkeinginan untuk dapat melakukan kerjasama melalui kesepakatan EPA. Tetapi dalam hal ini pasar juga harus dilindungi dengan cara penerapan standar secara serius.

Berkaitan dengan mulai terjalannya kerjasama bilateral ekonomi antara Indonesia dan Jepang, maka kedua negara lebih memperkuat hubungan kerjasama diplomatik tersebut dengan membentuk IJEPA, yang dalam hal ini dijelaskan pada skripsi Widiana Puspitasari, “Peranan Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan Jepang (IJEPA) dalam Eksplorasi Sumber Daya Alam di Indonesia: (Studi Kasus: Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Sarulla di Sumtra Utara)”, mengatakan dalam IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral antara Indonesia dan Jepang yang ditanda-tangani pada tanggal 20 Agustus 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinjo Abe. Kesepakatan ini merupakan perjanjian perdagangan bebas bilateral pertama yang dilakukan Indonesia dan yang paling komprehensif. IJEPA adalah sebuah *Free Trade Agreement New-Age* (FTA babak

¹⁴ Narongchai Akrasanee (ed), *ASEAN-Japan Cooperation: A Foundation for East Asia Community*, Tokyo: Japan Center for International Exchange, 2003, hlm. 28.

baru) yang terdiri dari 13 isu komprehensif dan bersifat WTO plus (melebihi kesepakatan-kesepakatan yang sudah diatur WTO) ditambah peningkatan kapasitas (*Capacity Building*) sebagai bagian dari *Partnership Agreement* (kemitraan).¹⁵ IJEPA adalah salah satu titik temu dari lobi-lobi kedua negara ini, saat penandatanganan kesepakatan IJEPA, disebutkan dalam pernyataan bersama bahwa perjanjian ini menetapkan kerangka yang berhubungan dengan perdagangan dan investasi dalam bidang Sumber Daya Energi dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan energi kedua negara. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari EPA Indonesia tentu harus memberikan sejumlah konsesi. Jepang meminta akses yang luas untuk perdagangan jasa dan pengadaan pemerintah (*government procurements*), dan perlindungan hak milik intelektual. Selain itu, Jepang meminta Indonesia untuk lebih menjamin pasokan energi dan sumber daya mineral. Jaminan bisa saja diberikan asalkan tidak mengganggu kepentingan pasokan energi dan sumber daya mineral bagi kebutuhan domestik bangsa Indonesia.

Selanjutnya pada penelitian Ranti Hasanah, “Kepentingan Kebijakan Jepang dalam Kerjasama Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) terhadap Indonesia”, dalam tulisannya menjelaskan bahwa IJEPA telah menjadi bagian penting dari suatu strategi pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan daya saing global, dalam hal ini pasar Jepang sebenarnya sudah cenderung terbuka, sehingga dapat dikatakan bahwa tarif bea masuk Jepang sudah hampir semuanya

¹⁵ Widiana Puspitasari, *Op.cit.* hlm 4.

mendekati 0%.¹⁶ Di dalam kesepakatan yang telah dilakukan dalam IJEPA, pihak Jepang menyatakan komitmennya akan membantu pihak Indonesia, dalam hal ini untuk meningkatkan kapasitas industrinya (*capacity building*) agar produknya maupun jasanya dapat memenuhi persyaratan mutu yang dituntut oleh Jepang melalui elemen perjanjian *cooperation*. Begitu juga dari pihak Indonesia sendiri dengan melalui IJEPA diharapkan dapat meningkatkan investasi Jepang di Indonesia yang selanjutnya dapat mengembangkan industri dan teknologi serta sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional maupun internasional.

Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan oleh Achdiat Atmawinata dan kawan-kawan yang merupakan tim penyusun dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia “Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global: Kajian *Capacity Building* Industri Manufaktur melalui Implementasi MIDEK-IJEPA”, dalam tulisannya menjelaskan bahwa dengan pengembangan MIDEK dalam kerangka kerjasama IJEPA merupakan sebuah cara yang perlu dikembangkan karena dilandasi oleh semangat pertumbuhan industri yang saling menguntungkan antara pihak Indonesia dan Jepang.¹⁷ Hal ini juga merupakan upaya

¹⁶ Ranti Hasanah, “Kepentingan Kebijakan Jepang dalam Kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) terhadap Indonesia”. Skripsi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. 2011, Jakarta.

¹⁷ Tim Penyusun: Achdiat Atmawinata, dkk. Dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia “Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global: Kajian *Capacity Building* Industri Manufaktur melalui Implementasi MIDEK-IJEPA”, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Desember 2008.

untuk menyeimbangkan pola pengembangan industri yang selama ini mayoritas dilakukan dengan mengandalkan peran eksklusif perusahaan multinasional Jepang yang telah berjalan sejak awal orde baru. Kesepakatan yang telah dicapai dalam berbagai perundingan dalam kerangka kerjasama IJEPA, memunculkan MIDECE sebagai upaya strategis untuk menyeimbangkan kepentingan kedua negara. Dengan implementasi MIDECE sebuah tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan kapasitas industri nasional yang pada tahap awal difokuskan pada tiga *driver sector*, yaitu (otomotif, elektronika, dan alat berat) dan satu persoalan jangka panjang bersama (konservasi energi).

Sementara itu dalam Jurnal Bob Widyahartono, “Tantangan Implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA) sebagai Pelaksanaan Kerjasama Perdagangan Internasional dalam Kerangka WTO”, menjelaskan dalam jurnal tersebut bahwa penanganan program-program dalam EPA, seperti *Manufacturing Industry Development Center* (MIDECE) dalam rangka *capacity building* perlu di implementasi lebih independen dan dikelola secara lebih profesional yang mendalami seluk beluk perdagangan, industri dan perbankan. Dalam arti yang menjadi kepala jangan birokrat, tetapi angkatlah tim kerja profesional non-birokrat yang diberdayakan (*empowered*). Tim profesional ini harus dengan sendirinya bergerak profesional dan senantiasa mempunyai jaringan kerja (*networking*) dengan pelaku ekonomi yang selalu berinteraksi dengan pelaku dan asosiasi ekonomi Jepang. Perjalanan implementasi bagi yang terkait dalam interaksi

dengan IJEPa masih jauh dan pasti perlu *work hard and smart* karena kekuatan ekonomi Jepang lebih besar dari pada kekuatan ekonomi Indonesia. Dengan demikian memasuki tahap implementasi pada 1 Juli 2008, berharap peningkatan ekspor Indonesia 4,7%, peningkatan akses pasar barang dan jasa di Jepang, dan Jepang akan menghapus 9,275 item *tariff* sehingga akan meningkatkan kesempatan bisnis besar 65 miliar pada tahun 2010.¹⁸ Jepang dalam hal ini berharap mendapatkan kemudahan dalam pasokan energi dan bahan baku dari Indonesia.

Untuk itu dalam bukunya Syamsul Hadi dan Shanti Darmastuti, “Dominasi Modal Jepang di Indonesia”, menjelaskan terkait dengan kepentingan Indonesia dalam hal alih teknologi, dengan adanya pembentukan MIDEc yang dirancang untuk dapat membantu perusahaan manufaktur Indonesia dalam hal mendapatkan bantuan teknis dalam rangka memenuhi standar kualitas internasional.¹⁹ Hal ini yang sangat berguna bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan pembangunan industri manufaktur dengan kualitas yang lebih baik sehingga nantinya dapat membantu dalam meningkatkan daya saing di pasar global. Meskipun dalam hal ini diselimuti oleh kepentingan-kepentingan antara kedua negara dalam kerjasama yang terjalin ini.

Untuk mengetahui cakupan proyek-proyek dalam implementasi IJEPa melalui MIDEc di Indonesia untuk mencapai peningkatan kerjasama ekonomi di

¹⁸ Bob Widyahartono, “Tantangan Implementasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPa) sebagai Pelaksanaan Kerjasama Perdagangan Internasional dalam Kerangka W.T.O.”, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

¹⁹ Syamsul Hadi dan Shanti Darmastuti, “Dominasi Modal Jepang di Indonesia – Telaah Kritis atas Dampak Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) Indonesia - Jepang ”, Institute for Global Justice (IGJ), Jakarta, 2009 hlm 75.

pembangunan industri manufaktur, maka dalam hal ini perlu mendapatkan prioritas pendanaan berupa *grant* dari pihak Jepang untuk berupaya dalam menyediakan dana pendamping dari pihak Indonesia serta partisipasi pendanaan dari pihak swasta Indonesia dan Jepang. Sehingga pembangunan industri manufaktur di Indonesia dapat dijalankan dengan baik sesuai kesepakatan dan prosedur yang ada.

Dengan meninjau dan membandingkan dari beberapa penelitian tersebut, maka dapat dilihat bahwa penelitian yang terfokus pada pembangunan industri manufaktur melalui implementasi *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC) pada kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang dalam kesepakatan *Indonesia-Japan Economy Partnership Agreement* (IJEPA) dapat dikatakan tidak terlalu banyak yang menyoroti permasalahan tersebut. Di mana sebagian besar penulis lebih mengfokuskan pada studi mengenai kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang dalam IJEPA dengan satu sektor utama yang menjadi pembahasan dalam studi kasus dari penelitian para peneliti tersebut. Tetapi dengan beberapa penelitian yang telah ditinjau penulis, maka penelitian-penelitian tersebut dapat menjadi referensi tambahan untuk memperkuat bagi penelitian yang akan dikaji oleh penulis dalam permasalahan pembangunan industri manufaktur melalui implementasi MIDEC pada kerjasama bilateral Indonesia dan Jepang dalam kesepakatan IJEPA.

I.5.2 Kerangka Teori

Dalam menganalisis skripsi ini perlu adanya kerangka teori untuk memperkuat pada penelitian ini. Kerangka teori didasarkan dari dasar-dasar pemikiran serta menggunakan anggapan dasar dari sebuah teori-teori para ahli yang sesuai dan dapat mendukung dalam suatu permasalahan yang dibahas. Fungsi dari kerangka teori adalah dapat menentukan variable-variabel apa saja yang terkait dalam penelitian tersebut. Dalam kerangka konseptual ini penulis akan mengutip teori atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan aspek yang diteliti dalam penelitian ini, untuk itu tindakan ini dimaksudkan untuk memberikan pondasi teoritis yang dapat membantu dalam mengaplikasikan metode-metode yang akan digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena Hubungan Internasional, khususnya dalam permasalahan yang dibahas. Dengan demikian maka penulis menggunakan teori kerjasama internasional, konsep *partnership* / kemitraan dalam kerjasama ekonomi dan model evaluasi program.

Hubungan Internasional merupakan suatu disiplin ilmu yang dalam hal ini mempunyai suatu gerak dinamika yang akan berkembang sehingga terdapat berbagai macam pendapat mengenai istilah itu sendiri. Hubungan Internasional dewasa ini telah memasuki suatu ruang lingkup yang begitu luas, di mana tidak menitik beratkan pada sifat hubungan yang formal atau berkaitan dengan Pemerintah tetapi lebih mencakup pada semua hal yang sifatnya lebih lintas batas nasional dari semua aspek kehidupan manusia. Untuk menganalisa suatu permasalahan yang dihadapi dalam

ilmu Hubungan Internasional diperlukan konsep dan teori. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi manufaktur di sektor industri. Karena dalam hal ini pembangunan di sektor industri manufaktur berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti dalam kapasitas industri di Indonesia dalam implementasi IJEPa melalui MIDEc. Dengan adanya pengembangan di sektor industri manufaktur, maka dapat menjadi penggerak perekonomian bagi Indonesia. Untuk itu penulis memberikan penjelasan mengenai definisi manufaktur sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Istilah manufaktur pertama kali digunakan tahun 1622. Kata manufaktur berasal dari kata latin "*manufactum*" yang berarti *made by hand*. Menurut CIRP /*International Conference on Production Engineering* tahun 1983, definisi manufaktur adalah.²⁰

"A Series of interrelated activities and operations involving the design, materials selection, planning, manufacturing production, quality assurance, management and marketing of products of the manufacturing industries".

Adapun definisi lain mengenai manufaktur yaitu suatu cabang industri yang mengaplikasikan peralatan dan suatu medium proses untuk transformasi bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. Dalam hal ini upaya ini melibatkan semua proses antara yang dibutuhkan untuk produksi dan integrasi komponen-komponen suatu produk. Beberapa industri, seperti produsen semi konduktor dan baja, juga menggunakan istilah fabrikasi atau pabrikasi. Sektor manufaktur sangat erat terkait

²⁰ Ummu Umam Sitnah Aisyah, "Pengertian Manufaktur, Industri, dan Produksi", diakses dari: <http://sitnaham-industrialengineering.blogspot.com/2011/03/pengertian-manufaktur-industridan.html/>. Pada tanggal 10 Januari 2011, pukul 20:50 WIB

dengan rekayasa atau teknik.²¹ Sementara itu menurut Kementerian Perindustrian menjelaskan mengenai definisi dalam Industri Pengolahan/Manufaktur, adalah:²²

“Semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang tergolong produk primer. Produk primer adalah produk-produk yang tergolong bahan mentah, yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan, dengan kemungkinan mencakup produk pengolahan-awal sampai dengan bentuk dan spesifikasi teknis yang standar dan lazim diperdagangkan sebagai produk primer-primer.”

Dengan demikian dari definisi-definisi yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan pengertian manufaktur adalah membuat suatu barang secara manual dengan menggunakan tangan, sehingga dapat diartikan bahwa manufaktur merupakan suatu proses dalam bidang industri untuk membuat suatu barang yang berasal dari bahan baku dengan melalui proses teknologi dalam menghasilkan barang-barang untuk kebutuhan manusia.

- **Teori Kerjasama Internasional**

Pada hakekatnya Hubungan Internasional adalah suatu bentuk interaksi perilaku, dalam hal ini baik antar negara, kelompok, maupun individu dalam berbagai macam karakteristik, maka akan melahirkan kerjasama Internasional. Sesuatu yang tidak mungkin bagi suatu negara untuk dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan negara lain dalam era globalisasi pada dewasa ini. Dapat dilihat dalam kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang selama ini relatif didasarkan pada

²¹ Rian kostans, “Artikel Manufaktur”, diakses dari: <http://riankostans.wordpress.com/artikel-manufaktur/>. Pada tanggal 10 Januari 2011, pukul 21:05 WIB

²²Departemen Perindustrian, “Kebijakan 05 KPIN“, diakses dari: <http://www.depperin.go.id/kebijakan/05KPIN-Bab1.pdf/>. Pada tanggal 10 Januari 2011, pukul 21:09 WIB

ketergantungan diantara kedua negara tersebut. Adapun konsep kerjasama menurut K.J.Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis menyatakan bahwa:²³

“Kerjasama Internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama dalam melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan satu sama lain. Dalam mengadakan suatu pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut, dan mencari kenyataan-kenyataan teknis (faktor-faktor) yang mendukung untuk jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian yang berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak.”

Dalam hal ini kerjasama antar suatu negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Pada dasarnya hubungan kerjasama antar negara dapat mempercepat dalam proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian suatu masalah diantara dua atau lebih negara tersebut. Menurut K.J Holsti, dalam proses kerjasama atau kolaborasi yang terbentuk dari perpaduan keanekaragaman masalah nasional, regional atau global yang muncul dan memerlukan perhatian lebih dari satu negara.²⁴ Dalam hal ini masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan yang membawa usul penanggulangan masalah, mengumpulkan bukti-bukti yang tertulis untuk membuktikan suatu usul dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian dalam hal pada pengertian yang memuaskan semua pihak. Untuk itu

²³ K.J Holsti, “Politik Internasional”, Kerangka Untuk Analisis, Jilid II, Terjemahan M. Tahrir Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hlm. 65

²⁴ *Ibid*, hlm. 66

menurut K.J Holsti dalam bukunya kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut.²⁵

1. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
2. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
3. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kerjasama regional dibedakan menjadi kerjasama regional yang menggunakan perangkat-perangkat kerjasama (*instrumen of cooperation*) yang menuju suatu integritas ekonomi (*economic integration*) dan kerjasama regional yang bersifat longgar (*loose*), yang tidak menggunakan perangkat kerjasama menuju

²⁵ *Ibid*, hlm. 652-653

integrasi ekonomi tetapi hanya menghimpun negara-negara anggotanya untuk mengadakan koordinasi dalam suatu kerjasama ekonomi (*economic cooperation*).²⁶

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, suatu negara tidak dapat menghindari dirinya dari suatu ketergantungan (*interdependensi*) terhadap negara lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa *interdependensi* lahir akibat dari semakin kompleksnya satu negara lain dalam suatu proses kehidupan bernegara. Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional mengenai kerjasama internasional, Dalam hal ini Koesnadi Kartasmita dalam bukunya “Organisasi dan Administrasi Internasional” mengungkapkan bahwa :²⁷

“Kerjasama Internasional merupakan keharusan sebagai akibat dari hubungan *Interpedensi* dan bertambah kompleksnya hubungan manusia dalam masa Internasional”.

Dalam kerjasama internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Untuk kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan-kepentingan yang dilakukan oleh kedua negara. Kerjasama bilateral ini akan muncul apabila kedua negara saling menyepakati pada kepentingan masing-masing. Jika bentuk perjanjian berupa kerjasama dan lingkupnya hanya terbatas pada dua negara saja maka

²⁶ Johan Syahperi Saleh, “Kerjasama Regional antara negara-negara ASEAN”, Economic, vol xii, no. 5, 1983, hlm 16 yang mengutip dari Bella Ballasa, *Economic Integration among Developing Contries*, Work Bank Paper . no 186, 1974

²⁷ Mohtar Mas’oed, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi”, 1994, Jakarta: LP3ES, hlm. 19.

kerjasama itu memiliki kecenderungan untuk bertahan lama, perlu diketahui, kerjasama tidak akan dilakukan bila suatu negara bisa mencapai tujuannya sendiri. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa kerjasama hanya akan terjadi, karena adanya saling ketergantungan antar negara-negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing. Sedangkan kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan sebagian dibawah pengawasan organisasi internasional internasional seperti PBB, ILO, WHO, UPU, dan lain-lain. Kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: faktor kesamaan kepentingan, dan kesamaan permasalahan, serta faktor geografis. Berikut ini merupakan konsep kerjasama multilateral dan kerjasama bilateral dalam EPA/FTA, di mana kerjasama yang dilakukan untuk dapat mencapai suatu keuntungan yang dapat meningkatkan perekonomian negara, dalam hal ini kerjasama yang dibentuk melalui WTO yang merupakan forum yang bertujuan untuk meliberalisasikan perdagangan dunia agar menjadi forum dalam negosiasi pada penghapusan hambatan tarif serta untuk dapat menyelesaikan perselisihan dalam perdagangan.

Gambar 1.2

Konsep Kerjasama Multilateral dan Kerjasama Bilateral dalam EPA/FTA



Sumber: Kementerian Perindustrian RI, 2012²⁸

Suatu hubungan dalam kerjasama antar negara merupakan pertemuan bermacam-macam kepentingan nasional dari beberapa negara-negara yang bekerjasama dalam sifatnya yang tidak dapat dipenuhi oleh bangsanya sendiri. Sehingga kerjasama internasional dapat dilakukan secara bilateral, yaitu antara dua negara. Untuk itu maka hal ini yang dilakukan oleh Indonesia-Jepang dalam kerjasama ekonomi melalui IJEPA dalam pembangunan industri manufaktur di Indonesia dalam MIDEK. Dalam proses pelaksanaan Kerjasama Bilateral, menurut Spiegel menyatakan bahwa dapat ditemukan tiga motif, yaitu:²⁹

1. Memelihara Kepentingan Nasional

²⁸ Kementerian Perindustrian, *Log.cit.* hlm. 5.

²⁹ Spiegel, Steven L, "World Politics In A New Era", 1995, New Jersey: Harcourt Brace College Publishers, hlm. 67.

2. Memelihara Perdamaian
3. Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi.

Kerjasama bilateral meliputi kerjasama diplomatik dan *strategic partnership program*, dengan kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara dalam suatu kesepakatan, seperti dalam kesepakatan *economic agreement*, yang dilakukan untuk peningkatan ekonomi kedua negara. Untuk itu kerjasama bilateral tersebut melibatkan kepercayaan *normative* yaitu dalam hal ini adalah pembuat kebijakan yang dilakukan pemerintah yang berasal dari kedua negara masing-masing. Secara umum kerjasama bilateral yang dilakukan tidak melibatkan sektor swasta karena sebagian urusan yang ditangani ini merupakan urusan luar negeri. Sedangkan secara khusus, dinamika kerjasama ekonomi yang dilakukan secara bilateral sama-sama mempunyai kepentingan masing-masing, meskipun antara kedua negara ini melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, tetapi dari kedua negara tidak berarti sama dalam hal tingkat perekonomian, sumber daya alam, serta kemajuan perkembangan teknologi yang berbeda dari kedua negara. Adapun kelemahan dan kelebihan yang terdapat dari kerjasama bilateral. Dalam kelemahan untuk melakukan kerjasama bilateral, di mana pada saat begitu banyak negara yang memiliki kepentingan dan tujuan yang akan dicapai, maka dalam hal ini kerjasama bilateral tidak akan efektif karena masing-masing negara harus setuju dalam hal kesepakatan. Untuk kelebihan dari kerjasama bilateral yang dilakukan yaitu:

1. Kerjasama ini cenderung mudah dilakukan karena negara yang terlibat hanya dua dan aturan yang diterapkan tidak begitu kompleks.
2. Bagi negara besar dengan adanya konsep kerjasama bilateral ini dapat menekan negara dari lawan kerjasamanya untuk mematuhi dan mengikuti aturan yang telah di sepakati bersama.
3. Dalam hal kakulasi dan pencapaian pertimbangan tidak begitu rumit, karena hanya dilakukan oleh dua negara saja.³⁰

Dalam konteks kerjasama bilateral, Indonesia berupaya untuk memantapkan dan meningkatkan hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat, dengan terus mempelajari kemungkinan pembinaan hubungan bilateral dengan negara-negara yang dinilai berpotensi membantu upaya pencapaian kepentingan nasional Indonesia. Indonesia juga akan terus mengupayakan kehidupan politik bertetangga baik dengan negara-negara yang secara geografis berbatasan langsung, namun tentunya dengan tetap didasarkan pada prinsip kesejahteraan dan saling menghormati.

Pada dasarnya suatu kerjasama antar negara dilakukan oleh dua negara atau lebih, dalam hal ini untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan masing-masing dalam mencapai kepentingan suatu negara. Kerjasama yang dilakukan antar negara merupakan bentuk interaksi yang paling utama karena pada dasarnya kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul karena adanya dua orang atau

³⁰ Roro Lonita Lorensa, "Perubahan Strategi Perdagangan China Di Wilayah Asia Tenggara Dari Bilateralisme Ke Multilateralisme", Skripsi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2011, Jakarta.

kelompok yang saling berinteraksi dalam kerjasama untuk dapat mencapai beberapa tujuan tertentu. Dalam hal ini kerjasama internasional dapat diartikan sebagai upaya suatu negara dalam memanfaatkan negara atau pihak lain pada proses pemenuhan kebutuhan suatu negara.

Dalam teori kerjasama internasional begitu melekat dengan negara-negara yang melakukan hubungan kerjasama untuk dapat mencapai kepentingan negara masing-masing. Kerjasama ini juga yang membuat Indonesia dan Jepang melakukan hubungan diplomatik yang erat sebagai mitra yang penting melalui hubungan kerjasama secara bilateral antara kedua negara dalam kesepakatan IJEPA yang di implementasikannya melalui MIDECA untuk peningkatan pembangunan kapasitas industri manufaktur di Indonesia. Kerjasama internasional ini begitu penting dan bermanfaat bagi kedua negara dalam pencapaian target masing-masing negara. Dan dalam kerjasama ini tetap di perkuat dengan adanya kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang sesuai dengan kerjasama yang disepakati bersama, seperti halnya Indonesia–Jepang dalam kesepakatan IJEPA yang sebelumnya Jepang sudah melakukan kerjasama bilateral dengan beberapa negara-negara di ASEAN melalui kerangka EPA.

- **Konsep *Partnership* / Kemitraan dalam Kerjasama Ekonomi**

Kemitraan / *Partnership* adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua negara atau kedua belah pihak yang bekerjasama untuk dapat mencapai suatu tujuan bersama. Kemitraan dalam hal ini mampu memberi keuntungan atau nilai lebih bagi

masing-masing pihak yang bekerjasama, sehingga nantinya dapat memberi *win-win solution*. Setiap negara cenderung memperkuat negaranya masing-masing baik secara ekonomi, politik-militer, budaya lokal (*origin*) karena akan menjadi ancaman bagi suatu negara apabila tidak memperkuat negaranya. Linton mengemukakan beberapa alasan mengapa harus bermitra adalah:³¹

"Untuk bisa mencapai tujuan yaitu kesejahteraan bersama (kesejahteraan ekonomi, sosial dan menjaga keamanan bersama), beberapa pihak seringkali tidak bisa melakukannya sendiri-sendiri. Keterbatasan sumber daya (fisik-geografis, sosial, ekonomi) yang dimiliki oleh masing-masing kelompok telah 'memaksa' untuk saling berbagi sumber daya yang dimiliki dan melakukan kerjasama. Kemitraan tidak selalu dimaksudkan untuk mencapai tujuan bersama. Setiap pihak yang bermitra bisa saja memiliki tujuan sendiri-sendiri. Esensi terpenting adalah berbagi sumber daya dan saling menguntungkan".

Dalam aspek ekonomi, mengakui prinsip ekonomi neoklasik tentang kelangkaan (*scarcity*) dan asas efisiensi untuk mengatasinya tetapi berbeda dengan teori ekonomi klasik dalam cara-cara mencapai "harmoni" atau "keseimbangan" yaitu tidak dengan menyerahkan pada mekanisme pasar melalui persaingan (*competition*) tetapi melalui kerjasama (*cooperation*) dan tindakan bersama (*collective action*).³² Untuk itu dalam hal ini akan tercapai keseimbangan antara pertumbuhan dalam jangka pendek di satu sisi dan aspek pemerataan dan sustainabilitas dalam jangka panjang disisi lain. Menurut pendapat Eisler, Rione & Montuori, Alfonso, ada beberapa model hubungan kemitraan, yaitu: *Pertama*, hubungan dominasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama menguasai pihak kedua. *Kedua*, hubungan subordinasi artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak

³¹ Linton, L, "Partnership, Modal Ventura", Penerbit PT. IBEC, Jakarta, 1995, hlm. 76

³² Mubyarto, "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial". Gajah Mada Press.: Yogyakarta, 2002

kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri tunduk pada kemauan pihak pertama. Dan *ketiga*, hubungan kemitraan artinya pihak pertama dan kedua selevel di mana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerjasama dan saling menghargai.³³

Kerjasama ekonomi dapat mempunyai beberapa bentuk, tergantung dari sampai berapa jauh otonomi di dalam kebijaksanaan ekonomi yang diberikan oleh masing-masing negaranya kepada badan pengambilan keputusan pada tingkat supranasional. Adapun bentuk kerjasama ekonomi yang dapat digolongkan, sebagai berikut:³⁴

1. Kerjasama ekonomi yang meliputi persetujuan yang hanya mencapai tingkat konsultasi dengan tidak adanya komitmen-komitmen yang dapat menghalangi pengambilan keputusan setiap negara anggotanya di dalam menentukan kebijaksanaan dan implementasi-implementasinya.
2. Kerjasama ekonomi yang meliputi kegiatan-kegiatan yang memerlukan adanya tindakan bersama (*joint action*) untuk mencapai suatu tujuan secara spesifik ditentukan dan disetujui bersama yang mana tidak membatasi setiap pilihan kebijaksanaan setiap negara anggotanya.
3. Kerjasama ekonomi yang merupakan suatu bentuk kerjasama yang paling sulit dicapai karena meliputi persetujuan-persetujuan yang membatasi pilihan-

³³ Eisler, Rione and Montuori, Alfonso. "The Partnership Organization: A System Approach", OD Practitioner, Vol. 33, No 2, 2001, hlm. 66

³⁴ *Ibid.*

pilihan setiap negara anggotanya dalam memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru.

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya kerjasama bidang ekonomi antar negara, yaitu:³⁵

1. Faktor Potensi Ekonomi

Negara maju membutuhkan suatu pusat baru untuk melakukan relokasi industri yang tidak mampu lagi di akomodir dalam wilayah teritorial negaranya. Negara berkembang memanfaatkan ini sebagai suatu peluang penanaman modal atau investasi bagi pembangunan negaranya. Pada tujuannya kegiatan ini mengusahakan tingkat efesiensi yang lebih tinggi serta kemakmuran bersama bagi kedua belah pihak.

2. Faktor Efektifitas Birokrasi

Pergeseran pola sistem ekonomi internasional mengharuskan negara berkembang menjalin kerjasama dengan negara negara maju atau sebaliknya negara maju bekerjasama dengan negara berkembang yang mempunyai kapasitas untuk menjadi *power* di bidang ekonomi. Disini di tuntutan keefektifitasan birokrasi (pemerintah) dalam mengambil strategi yang tepat untuk mempermudah proses serta mekanisme investasi serta memberikan insentif yang mampu menjadi daya tarik (*pullung factor*).

³⁵ Budiono, "Ekonomi Internasional", BPFE, Yogyakarta, 1991.

Keterkaitan dalam kerjasama ekonomi dalam IJEPA adalah untuk dapat saling meningkatkan perekonomian kedua negara melalui kesepakatan yang terjalin. Dalam hal ini MIDEDEC diharapkan mendorong kemampuan industri menghadapi semakin terbukanya pasar di dalam negeri sekaligus memasuki pasar global. Tiga belas subsektor yang tercakup dalam MIDEDEC antara lain sektor otomotif dan komponennya, elektronik dan perlengkapan elektrik, produk baja, tekstil, petrokimia dan oleo kimia, industri logam nonbaja, makanan dan minuman, konservasi energi, UKM, *welding*, dan *tooling*. Pemerintah berharap MIDEDEC-IJEPA mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menyerap teknologi pembuatan komponen. Khususnya di sektor industri otomotif, elektronik, dan permesinan yang diharapkan menjadi andalan industri nasional di masa depan. Model pembangunan yang bergantung yang dilihat dari sisi Indonesia sebagai negara berkembang yang memerlukan negara maju untuk peningkatan perekonomiannya dan kesejahteraan rakyat melalui proses pembangunannya. Hal ini yang menjadikan negara-negara berkembang dengan proses pembangunannya akan bertransformasi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang maju.

- **Model Evaluasi Program**

Model evaluasi program yang digunakan adalah model evaluasi *Context evaluation Input evaluation Process evaluation Product evaluation* (CIPP) adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada

administrator atau leader pengambil keputusan. CIPP yang merupakan sebuah singkatan dari huruf awalnya empat kata, yaitu *Context evaluation* : evaluasi terhadap konteks, *Input evaluation* : evaluasi terhadap masukan, *Process evaluation* : evaluasi terhadap proses, *Product evaluation* : evaluasi terhadap hasil. CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai sebuah sistem. Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 bagian yang diuraikan sebagai berikut:³⁶

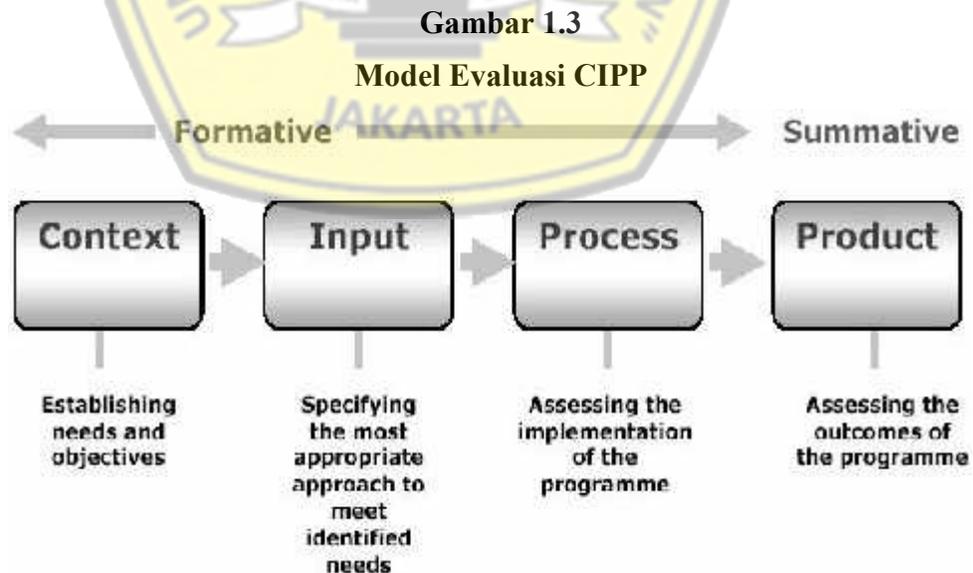
1. *Context evaluation to serve planning decision*. Seorang evaluator harus cermat dan tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan program.
2. *Input Evaluation structuring decision*. Segala sesuatu yang berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. Input evaluasi ini akan memberikan

³⁶ Daniel L. Stufflebeam and Anthony J. Shinkfield, "Systematic evaluation: A self-instructional guide to theory and practice", Kluwer-Nijhoff : Boston, 1985.

bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif

Model Evaluasi program ini bermaksud membandingkan kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu, untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan *judgment* mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Stufflebeam melihat tujuan model evaluasi ini, yaitu:

1. Penetapan dan penyediaan informasi yang bermanfaat untuk menilai keputusan alternatif;
2. Membantu audience untuk menilai dan mengembangkan manfaat program pendidikan atau obyek;
3. Membantu pengembangan kebijakan dan program.



Sumber : The CIPP approach to evaluation (Bernadette Robinson, 2002)

Tabel 1.2
Penjelasan Mengenail Struktur Model Evaluasi CIPP

<i>Aspect of evaluation</i>	<i>Type of decision</i>	<i>Kind of question answered</i>
<i>Context evaluation</i>	<i>Planning decisions</i>	<i>What should we do?</i>
<i>Input evaluation</i>	<i>Structuring decisions</i>	<i>How should we do it?</i>
<i>Process evaluation</i>	<i>Implementing decisions</i>	<i>Are we doing it as planned? And if not, why not?</i>
<i>Product evaluation</i>	<i>Recycling decisions</i>	<i>Did it work?</i>

Sumber : The CIPP approach to evaluation (Bernadette Robinson, 2002)

1.6 Model Analisis



1.7 Asumsi

Dalam permasalahan pembangunan industri manufaktur melalui MIDEK dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan Jepang yang terjalin dalam implementasi IJEPA, maka penulis berasumsi bahwa:

- Kerjasama IJEPA karena adanya produk dari asimetris kedua negara.
- Desain kerjasama melalui MIDEK merefleksikan kerjasama bilateral dari kedua belah pihak dalam proses kerjasama IJEPA.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk dapat menjelaskan permasalahan mengenai Implementasi *Indonesia Jepang Economy Partnership Agreement (IJEPA)* dalam Pembangunan Kapasitas Industri Manufaktur melalui *Manufacturing Industry Development Center (MIDEK)* di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer dalam penelitian ini data-data didapatkan secara langsung dari narasumber yang kompeten dan mendalami permasalahan yang sedang penulis teliti. Untuk itu dalam penelitian dalam penulisan ini menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Sedangkan untuk data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian terdahulu baik berupa buku, artikel-artikel di jurnal ilmiah dan laporan penelitian dari lembaga-lembaga pemerintah. Selanjutnya data-data ini juga akan diperkaya dengan

berita-berita dari media massa, antara lain surat kabar. Untuk itu data-data sekunder dalam metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *internet research* dan *documentary research*.

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis akan melakukan serangkaian prosedur yang meliputi pemurnian data, kategorisasi data (*coding*) dan interpretasi serta induksi data menjadi sebuah generalisasi. Dalam aktivitas pemurnian data, penulis memilih data-data yang benar-benar diperlukan berdasarkan *insight teory* yang dipakai. Kemudian setelah itu penulis mengelompokkan data-data kedalam kategori-kategori tertentu yang penulis buat berdasarkan indikator-indikator yang penulis turunkan dari teori yang dipakai. Penulis kemudian membuat interpretasi dan generalisasi mengenai logika kausalitas (hubungan sebab-akibat) antar data-data tersebut berdasarkan logika *explanatoris* teori. Generalisasi ini akan penulis pakai untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam upaya memberikan pemahaman mengenai isi dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 4 bab yang terdiri dari bab dan sub-bab yang saling berkaitan satu sama lain, Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN, berisikan sub-bab latar belakang suatu tatanan politik dunia internasional yang mengalami perkembangan dengan proses transformasi yang begitu luas terhadap bidang ekonomi, politik global, dan pola hubungan yang dilakukan antar suatu negara. Selanjutnya mengenai hubungan kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Jepang melalui IJEPA kemudian dilanjutkan dengan kerjasama dalam rangka pembangunan kapasitas industri yang merupakan salah satu kegiatan utama yang diprioritaskan Indonesia dalam MIDECA, yang melalui IJEPA. Selain tinjauan sejarah sub-bab latar belakang ini juga berisi permasalahan pokok, tujuan, serta manfaat penelitian. Sub-bab lainnya adalah kerangka pemikiran, yang berisikan tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, dan asumsi penelitian. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah metode penelitian yang berisikan jenis penelitian, sumber data, teknik penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB II: Kerjasama Industri Manufaktur Indonesia–Jepang Melalui IJEPA: *Manufacturing Industry Development Center* (MIDECA), bab ini menjelaskan tentang latar belakang pembentukan IJEPA, dan menjelaskan juga mengenai MIDECA merupakan salah satu peningkatan daya saing industri di Indonesia untuk mencapai *capacity building*.

BAB III: Bentuk-Bentuk Implementasi Kerjasama Industri Manufaktur antara Indonesia–Jepang melalui MIDEC, bab ini menjelaskan mengenai stakeholders dalam pembangunan industri manufaktur melalui MIDEC yang akan mensukseskan pencapaian dalam pelaksanaan implementasi IJEPA melalui MIDEC, selanjutnya di bab ini menjelaskan mengenai sektor-sektor industri manufaktur yang tercakup dalam 13 sektor di dalam MIDEC, serta menjelaskan mengenai model-model MIDEC pada penerapan pembangunan industri manufaktur dalam mencapai *capacity building* di Indonesia, dan juga menjelaskan tentang bentuk-bentuk implementasi dalam kerangka MIDEC melalui pengembangan SDM. Dan selanjutnya menjelaskan tentang peluang dan hambatan yang terjadi dalam implementasi IJEPA melalui MIDEC.

BAB IV: PENUTUP, bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan penelitian mengenai implementasi IJEPA dalam pembangunan kapasitas industri manufaktur melalui MIDEC periode 2008-2011, untuk itu dalam bab ini peneliti mencoba memberikan kesimpulan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh penulis.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP